



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

BBLK
SURABAYA
The Ultimate Laboratory @ Soerabaya since 1917

LAPORAN KEUANGAN BLU TA 2023

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA

Jalan Karangmenjangan No 18, Surabaya - 60286

Telepon Pelayanan : (031) 5020306, TU : (031) 5021451; Faksimili : (031) 5020388

e-mail : bblksurabaya@yahoo.co.id website : www.bblksurabaya.id



Komite Akreditasi
Laboratorium Kesehatan
No : 120/S/KALK-P/XII/2017



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kesehatan RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surabaya, 31 Desember 2023

Pt. Kepala



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Laporan Perubahan Saldo Awal Lebih	6
III. Neraca	7
IV. Laporan Operasional	8
V. Laporan Perubahan Ekuitas	9
VI. Laporan Arus Kas	10
VII. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Awal Lebih	31
D. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	33
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	44
F. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	50
G. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas	55
H. Pengungkapan Penting Lainnya	57
VIII. Lampiran	



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA

Jalan Karangmenjangan No. 18 Surabaya 60286

Telepon Pelayanan : (031)5020306; TU : (031)5021451; Faksimile : (031)5020388

Website : bblksurabaya.id; Surat Elektronik : bblksub@yahoo.co.id



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA

TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya (Kode Satker: 415602) berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya.

Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat perbedaan yang menyajikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas telah disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Surabaya, 5 Januari 2024

Ketua Satuan Pemeriksaan Intern



Ita Andayani, S.ST

NIP. 197004101992032003



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105062657





KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA

Jalan Karangmenjangan No. 18 Surabaya 60286

Telepon Pelayanan : (031)5020306; TU : (031)5021451; Faksimile : (031)5020388

Website : bblksurabaya.id; Surat Elektronik : bblksurabaya@yahoo.co.id



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan TA 2023 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Laporan Arus Kas, (f) Laporan Saldo Anggaran Lebih dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surabaya, 31 Desember 2023
Pj. Kepala

dr. Andi Saguni, MA
NIP. 197201172000121001



Management
System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID: 9105062657

Laporan Keuangan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp24.372.591.649 atau mencapai 119,39 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp20.415.007.000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp41.804.175.113 atau 98,73 persen dari alokasi anggaran sebesar 42.341.537.000.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Saldo Anggaran Lebih Awal pada 31 Desember adalah berupa Saldo Anggaran Lebih Akhir pada 31 Desember TA 2022 sebesar Rp10.176.304.247.

Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan sebesar Rp(17.431.583.464). Penyesuaian transaksi BLU dengan BUN adalah Pendapatan Alokasi APBN sebesar Rp13.465.447.868 dan penyetoran PNPB ke Kas Negara sebesar Rp(154.720.164) sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp6.055.448.487.

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp35.819.291.730 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp7.190.033.734, Aset Tetap (neto) sebesar Rp28.431.492.371 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp197.765.625. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp77.969.375 dan Rp35.741.322.355.

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp37.701.399.353, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp44.190.979.816 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(6.489.580.463). Surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp(178.755.498) sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp(6.668.335.961).

5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp34.039.952.835 ditambah defisit-LO sebesar Rp(6.668.335.961), koreksi nilai aset tetap non revaluasi Rp0, koreksi lain-lain senilai Rp64.110.606, koreksi atas reklasifikasi Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8.305.594.875 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp35.741.322.355.

6. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Arus kas masuk dari aktivitas operasi diperoleh dari: Pendapatan APBN sebesar Rp13.465.447.868, Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium sebesar Rp23.802.656.362, Pendapatan jasa layanan kepada entitas lain sebesar Rp118.255.000, Pendapatan PNBPN Umum sebesar Rp3.471.276 dan Pendapatan Jasa Layanan Perbankan Rp296.960.123. Arus kas keluar digunakan untuk: Pembayaran Belanja Pegawai sebesar Rp(15.695.647.687), dan Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp(1.499.104.970), Pembayaran Jasa sebesar Rp(2.206.394.551), Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan sebesar Rp(11.819.137.791), Pembayaran Pemeliharaan sebesar Rp(2.925.235.242), Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp(755.738.813), Pembayaran Barang dan Jasa BLU sebesar Rp(1.782.365.226) serta penyetoran PNBPN ke kas Negara sebesar Rp (154.720.164).

Arus kas dari aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas. Arus masuk dari aktivitas investasi berupa penjualan atas aset tetap lainnya/aset lainnya sebesar Rp151.248.888. Arus kas keluar dari aktivitas investasi berupa perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp(5.120.550.833).

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan berupa penerimaan pembiayaan investasi yang berasal dari APBN sebesar Rp0. Arus keluar dari aktivitas pendanaan berupa penyetoran ke kas negara sebesar Rp0.

Arus kas dari aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga yang berupa potongan pajak. Arus kas masuk sebesar Rp0 dan arus keluar dari aktivitas transitoris sebesar Rp0.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas untuk 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Des 2023		% thd Angg	31 Des 2022 (Audited)
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	20.415.007.000	24.372.591.649	119,39	22.497.761.366
JUMLAH PENDAPATAN		20.415.007.000	24.372.591.649	119,39	22.497.761.366
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	5.936.547.000	5.734.248.844	96,59	5.942.118.182
Belanja Barang	B.4	31.283.789.000	30.949.375.436	98,93	29.130.358.110
Belanja Modal	B.5	5.121.201.000	5.120.550.833	99,99	3.026.790.531
JUMLAH BELANJA		42.341.537.000	41.804.175.113	98,73	38.099.266.823
SURPLUS/DEFISIT	B.6		(17.431.583.464)		(15.601.505.457)
SILPA / (SIKPA)			(17.431.583.464)		(15.601.505.457)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	10.176.304.247	6.735.968.096
Penggunaan SAL	-	-
Sub Total	10.176.304.247	6.735.968.096
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	(17.431.583.464)	(15.601.505.457)
Penyesuaian transaksi BLU dgn BUN:		
Pendapatan Alokasi APBN	13.465.447.868	19.621.070.371
Penyetoran PNBK ke Kas Negara	(154.720.164)	(579.228.763)
Penyetoran surplus BLU ke Kas Negara		
Pengembalian pendapatan BLU	-	-
Transaksi antar BLU	-	-
Sub Total	13.310.727.704	19.041.841.608
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Setelah Penyesuaian	(4.120.855.760)	3.440.336.151
Sub Total	6.055.448.487	10.176.304.247
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
Lain-lain	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	6.055.448.487	10.176.304.247

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. NERACA

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2023	31 DES 2022 (Audited)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1		-
Kas pada Badan Layanan Umum	C.2	6.055.448.487	10.176.304.247
Piutang Bukan Pajak	C.3	-	-
Piutang bukan pajak (Netto)		-	
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.4	47.285.000	29.205.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari keg. BLU	C.5	(236.425)	(146.025)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)		47.048.575	29.058.975
Persediaan	C.6	1.087.536.672	1.169.482.846
Jumlah Aset Lancar		7.190.033.734	11.374.846.068
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.7	61.775.588.549	55.839.445.045
Gedung dan Bangunan	C.8	12.076.323.948	10.251.756.342
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.9	563.248.000	563.248.000
Akumulasi Penyusutan	C.10	(45.983.668.126)	(44.268.293.404)
Jumlah Aset Tetap		28.431.492.371	22.386.155.983
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.11	2.300.192.500	2.300.192.500
Aset Lain-Lain	C.12	-	684.753.571
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.13	(2.102.426.875)	(2.642.030.706)
Jumlah Aset Lainnya		197.765.625	342.915.365
JUMLAH ASET		35.819.291.730	34.103.917.416
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.14	-	-
Utang yang Belum Ditagihkan	C.15	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.16	77.969.375	63.964.581
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		77.969.375	63.964.581
JUMLAH KEWAJIBAN		77.969.375	63.964.581
EKUITAS			
Ekuitas	C.17	35.741.322.355	34.039.952.835
JUMLAH EKUITAS		35.741.322.355	34.039.952.835
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		35.819.291.730	34.103.917.416

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2023	31 DES 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan alokasi APBN		13.465.447.868	19.621.070.371
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat		23.820.736.362	21.563.789.829
Pendapatan jasa layanan dari entitas lain		118.255.000	94.169.500
Pendapatan Hibah BLU		-	-
Pendapatan hasil kerjasama BLU		-	-
Pendapatan BLU Lainnya		296.960.123	267.793.274
JUMLAH PENDAPATAN	E.1	37.701.399.353	41.546.822.974
BEBAN			
Beban Pegawai	E.2	15.695.647.687	15.619.815.560
Beban Persediaan	E.3	12.339.252.925	10.887.015.744
Beban Barang dan Jasa	E.4	5.565.834.122	4.614.240.930
Beban Pemeliharaan	E.5	4.642.014.860	3.663.302.295
Beban Perjalanan Dinas	E.6	755.738.813	693.370.224
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.7	5.471.100.663	4.908.510.845
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.8	236.425	146.025
JUMLAH BEBAN		44.469.825.495	40.386.401.623
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(6.768.426.142)	1.160.421.351
KEGIATAN NON OPERASIONAL	E.9		
Pendapatan Pelepasan Aset Non lancar		151.248.888	98.801.209
Beban Pelepasan Aset Non lancar		178.755.498	177.126.063
SURPLUS/DEFISIT PENJUALAN ASET NON LANCAR		(27.506.610)	(78.324.854)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		3.471.276	480.427.554
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		154.720.164	579.228.763
LAINNYA		(151.248.888)	(98.801.209)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(178.755.498)	(177.126.063)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(6.947.181.640)	983.295.288

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2023	31 DES 2022
EKUITAS AWAL	F.1	34.039.952.835	32.998.878.615
SURPLUS/DEFISIT LO	F.2	(6.947.181.640)	983.295.288
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	F.3		
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		64.110.606	50.353.932
PENYESUAIAN NILAI ASET	F.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	F.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	F.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	F.3.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	F.3.5	64.110.606	50.353.932
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	F.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	F.4	8.584.440.554	7.425.000
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	F.5	1.701.369.520	1.041.074.220
EKUITAS AKHIR	F.6	35.741.322.355	34.039.952.835

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

VI. LAPORAN ARUS KAS

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE YG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan APBN	13.465.447.868	19.621.070.371
Pendapatan Jasa Layanan Kepada Masyarakat	23.802.656.362	21.556.569.829
Pendapatan Jasa Layanan Kepada Entitas Lain	118.255.000	94.169.500
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	-	-
Pendapatan dari Hibah	-	-
Pendapatan Usaha Lainnya	296.960.123	267.793.274
Pendapatan PNPB Umum	3.471.276	480.427.554
Jumlah Arus Masuk Kas	37.686.790.629	42.020.030.528
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Belanja Pegawai	(15.695.647.687)	(15.619.815.560)
Pembayaran Belanja Barang	(1.499.104.970)	(2.693.844.094)
Pembayaran Jasa	(2.206.394.551)	(1.477.928.725)
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(11.819.137.791)	(12.005.309.047)
Pembayaran Pemeliharaan	(2.925.235.242)	(2.203.705.112)
Pembayaran Perjalanan Dinas	(755.738.813)	(693.370.224)
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	(1.782.365.226)	(378.503.530)
Pembayaran Bantuan Sosial	-	-
Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	-	-
Penyetoran PNPB ke kas negara	(154.720.164)	(579.228.763)
Jumlah Arus Keluar Kas	(36.838.344.444)	(35.651.705.055)
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi	848.446.185	6.368.325.473
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	151.248.888	98.801.209
Jumlah Arus Masuk Kas	151.248.888	98.801.209
Arus Keluar Kas		
Perolehan Peralatan dan Mesin	(5.120.550.833)	(2.453.128.689)
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	-	(377.191.842)
Perolehan atas Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	-	(196.470.000)
Jumlah Arus Keluar Kas	(5.120.550.833)	(3.026.790.531)
Arus Kas Bersih dari aktivitas Investasi	(4.969.301.945)	(2.927.989.322)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas		
Penyetoran ke Kas Negara	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
Arus Kas Bersih dari aktivitas Pendanaan	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	140.742.624
Jumlah Arus Masuk Kas	-	140.742.624
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	(140.742.624)
Jumlah Arus Keluar Kas	-	(140.742.624)
Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris	-	-
Kenaikan/Penurunan Kas BLU	(4.120.855.760)	3.440.336.151
Saldo Awal Kas Setara Kas BLU	10.176.304.247	6.735.968.096
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU	6.055.448.487	10.176.304.247
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain		
Saldo Akhir Kas pada BLU	6.055.448.487	10.176.304.247
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :		
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
9. Peraturan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/I/4001/2014 tentang Pedoman Piutang Badan Layanan Umum Rumah Sakit atau Balai.
10. PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
11. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-66/PB/2018 Tanggal 4 Januari 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2017.

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di bidang laboratorium kesehatan. Laboratorium kesehatan sebagai salah satu mata rantai pelayanan kesehatan mempunyai peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan pelayanan

laboratorium serta pemberian bimbingan teknis di bidang laboratorium kesehatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya mempunyai fungsi pelayanan laboratorium, pemantapan mutu, pelaksanaan bimbingan teknis, sistem rujukan, jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan serta pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi umum.

Seluruh kegiatan tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia **Nomor 52/MENKES/Per/VI/2013 tanggal 22 Juli 2013**, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Dengan adanya **Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2012** tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang PK-BLU (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171), maka organisasi dan tata kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya mulai berpedoman pada peraturan tersebut dengan subsidi dari pemerintah yang masih diterima untuk membiayai kegiatan investasi dan kegiatan operasional.

VISI BBLK SURABAYA

“Menjadi laboratorium kesehatan nasional berkualitas, unggul, berbudaya dan berteknologi tinggi tahun 2024”

MISI BBLK SURABAYA

1. Melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan yang berstandar internasional
2. Membangun jejaring dan kemitraan laboratorium kesehatan yang berkesinambungan
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya yang tersedia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi
4. Menciptakan layanan laboratorium kesehatan yang unggul dan berdaya saing
5. Menerapkan layanan laboratorium kesehatan yang berbudaya berdasarkan kearifan lokal

TATA NILAI BBLK SURABAYA

1. Cepat : Pelayanan segera
2. Efisien : Hemat waktu dan biaya

3. Ramah : Tutar kata halus, senyum, salam, sapa
4. Modern : Mengikuti perkembangan teknologi
5. Akurat : Benar dan tepat
6. Transparan : Informasi mudah diakses

MOTTO BBLK SURABAYA

Melayani dengan CERMAT

TUJUAN BBLK SURABAYA

1. Peningkatan jumlah rujukan pemeriksaan berkualitas
2. Pengembangan kerjasama lintas sektoral IPTEKDOK maupun pelayanan masyarakat yaitu terwujudnya profesionalisme melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian dalam bidang laboratorium
3. Pengembangan profesionalisme dan manajemen sumber daya manusia secara periodik yaitu terwujudnya institusi dengan fungsi manajemen yang baik dan konsisten serta pengelolaan keuangan yang mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel
4. Peningkatan pelayanan prima dari segi parameter, mutu, metode dan kecepatan yaitu dengan terwujudnya jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium yang cepat, tepat dan bermutu serta terciptanya berbagai jenis pelayanan yang mendukung pemeriksaan kesehatan dan pemantauan kesehatan

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pemeriksaan laboratorium klinik.
- Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.
- Pemantapan mutu internal dan eksternal.
- Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan.
- Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi rujukan.
- Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan kerja.
- Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan.

- Pelaksanaan urusan tata usaha.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang

diterapkan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan R.I. yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihan adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama

dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan serta jalan, jaringan dan irigasi berupa jalan, jembatan dan bangunan air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam lingkup obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek penilaian berupa Tanah, dan tanpa survei lapangan untuk obyek penilaian kembali selain tanah.
- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai aset tetap yang lebih akurat, andal dan wajar.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan

Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan Kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Brang Milik Negara berupa Asset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintahan disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp24.372.591.649

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp24.372.591.649 atau mencapai 119,39 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp20.415.007.000. Pendapatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Des 2023

Uraian	31 Des 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Badan Layanan Umum	20.126.507.000	23.802.656.362	118,27
Pendapatan dari Pelayanan Pemerintah yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam 1 K/L	72.500.000	118.255.000	163,11
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	204.000.000	178.845.123	87,67
Pendapatan lain-lain BLU	12.000.000	118.115.000	984,29
Pendapatan Lainnya	-	154.720.164	100,00
Jumlah	20.415.007.000	24.372.591.649	119,39

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 sebesar Rp24.372.591.649 disebabkan peningkatan pelayanan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, salah satunya Pemantapan Mutu Eksternal.

Realisasi pendapatan sebesar Rp24.372.591.649 berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp23.802.656.362, Pendapatan dari Pelayanan Pemerintah yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam 1 K/L sebesar Rp118.255.000, pendapatan jasa layanan perbankan BLU sebesar Rp178.845.123 berasal dari jasa giro bank, pendapatan lain-lain BLU sebesar Rp118.115.000 dan pendapatan lainnya sebesar Rp154.720.164.

Pendapatan lain-lain BLU sebesar Rp118.115.000 merupakan pendapatan sewa ruangan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya meliputi sewa ruang kuliah, sewa ruang kantin, sewa ruang koperasi dan sewa fasilitas untuk menyimpan sampel.

Pendapatan Lainnya Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya sebesar

Rp154.720.164 berasal antara lain dari pendapatan pemindahtanganan BMN lainnya sebesar Rp151.248.888 dan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp3.471.276.

Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya sebesar Rp151.248.888 merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan BMN yang dihentikan penggunaannya dalam operasi pemerintah (dalam kondisi rusak berat) melalui lelang dengan perantara KPNL Surabaya dengan rincian sebagai berikut:

1. Penjualan barang bergerak berupa 1 (satu) paket peralatan dan mesin sesuai dengan Risalah Lelang No. 1504/45/2023 tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp26.234.567. Sudah dilakukan penyetoran ke kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara tanggal 2 Agustus 2023 dengan NTPTN: 9D1B81JNFM164MLN dan NTB: 755672869388.
2. Penjualan kendaraan dinas berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G XW42 sesuai dengan Risalah Lelang No. 1503/45/2023 tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp90.599.999. Sudah dilakukan penyetoran ke kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara tanggal 3 Agustus 2023 dengan NTPTN: 2C10748VV5OCEL86 dan NTB: 755178030746.
3. Penjualan barang bergerak berupa 1 (satu) paket peralatan dan mesin sesuai dengan Risalah Lelang No. 1656/45/2023 tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp20.313.312. Sudah dilakukan penyetoran ke kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara tanggal 28 Agustus 2023 dengan NTPTN: EAECC1JNFM1UPKFB dan NTB: 821750795418.
4. Penjualan barang bergerak berupa 1 (satu) paket peralatan dan mesin sesuai dengan Risalah Lelang No. 2484/45/2023 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp4.000.000. Sudah dilakukan penyetoran ke kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara tanggal 22 November 2023 dengan NTPTN: 1A3E761QUR6PR9RB dan NTB: 036062972612.
5. Penjualan barang bergerak berupa 1 (satu) paket peralatan dan mesin sesuai dengan Risalah Lelang No. 2485/45/2023 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp10.101.010. Sudah dilakukan penyetoran ke kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara tanggal 22 November 2023 dengan NTPTN: F8BA361QUR6LHFCI dan NTB: 610846962268.

Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp3.471.276 merupakan pendapatan dari rumah dinas yang dipotong SPM gaji pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Badan Layanan Umum	23.802.656.362	21.556.569.829	10,42
Pendapatan dari Pelayanan Pemerintah yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam 1 K/L	118.255.000	94.169.500	25,58
Pendapatan Jasa Layanan Keuangan	178.845.123	218.843.274	(18,28)
Pendapatan Lain-lain BLU	118.115.000	48.950.000	141,30
Pendapatan Lainnya (PNBP)	154.720.164	579.228.763	(73,29)
Jumlah	24.372.591.649	22.497.761.366	8,33

Rincian capaian pendapatan BLU adalah sebagai berikut:

Rincian Capaian Pendapatan BLU

Keterangan	31 Desember 2023
Pendapatan Pelayanan Rumah Sakit	23.802.656.362
Pendapatan dari Pelayanan Pemerintah yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam 1 K/L	118.255.000
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	178.845.123
Pendapatan Lain-lain BLU	118.115.000
Kas dan Bank yang belum disahkan	-
Uang Tunai di bendahara pengeluaran	-
Jumlah	24.217.871.485

Capaian Pendapatan BLU sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp24.217.871.485 yaitu terdiri dari pendapatan pelayanan rumah sakit sebesar Rp23.802.656.362, Pendapatan dari Pelayanan Pemerintah yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam 1 K/L sebesar Rp118.255.000, pendapatan jasa layanan perbankan BLU sebesar Rp178.845.123, pendapatan lain-lain BLU sebesar Rp118.115.000, kas dan bank yang belum disahkan sebesar Rp0 dan uang tunai di bendahara pengeluaran sebesar Rp0.

B.2. Belanja

*Realisasi Belanja
Negara
Rp41.804.175.113*

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp41.804.175.113 atau 98,73 persen dari anggaran belanja sebesar Rp42.341.537.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2023

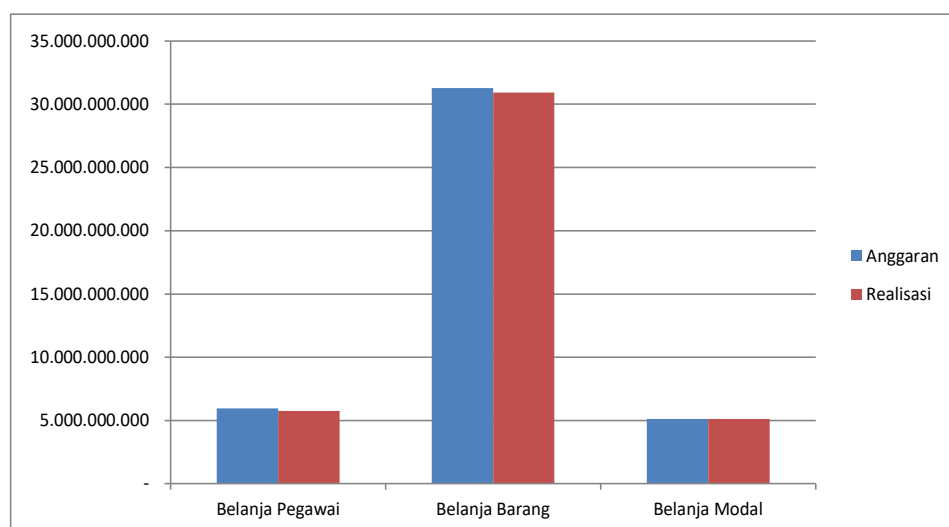
adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2023

URAIAN	31-Dec-22		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	5.936.547.000	5.737.470.024	96,65
Belanja Barang	31.283.789.000	30.949.375.436	98,93
Belanja Modal	5.121.201.000	5.120.550.833	99,99
Total Belanja Kotor	42.341.537.000	41.807.396.293	98,74
Pengembalian Belanja		(3.221.180)	
Jumlah	42.341.537.000	41.804.175.113	98,73

Pengembalian belanja sebesar Rp(3.221.180) merupakan pengembalian belanja terdiri dari pengembalian belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp(1.180) dan pengembalian belanja tunjangan umum PNS sebesar Rp(3.220.000).

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja 31 Desember 2023 sebesar Rp41.804.175.113 atau 98,73 persen disebabkan peningkatan volume belanja barang yang sejalan dengan peningkatan operasional yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Des 2023 dan 31 Des 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	5.734.248.844	5.942.118.182	(3,50)
Belanja Barang	30.949.375.436	29.130.358.110	6,24
Belanja Modal	5.120.550.833	3.026.790.531	69,17
Jumlah	41.804.175.113	38.099.266.823	9,72

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp5.734.248.844*

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.734.248.844 dan Rp5.942.118.182.

Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Des 2023 dan 31 Des 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.371.714.477	5.656.325.911	(5,03)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	123.025.547	103.430.753	100,00
Belanja Lembur	242.730.000	197.337.000	23,00
Jumlah Belanja Kotor	5.737.470.024	5.957.093.664	(3,69)
Pengembalian Belanja Pegawai	(3.221.180)	(14.975.482)	(78,49)
Jumlah Belanja	5.734.248.844	5.942.118.182	(3,50)

B.4 Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp30.949.375.436*

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp30.949.375.436 dan Rp29.130.358.110. Hal ini dikarenakan peningkatan volume belanja barang yang sejalan dengan peningkatan operasional yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya.

Perbandingan Belanja Barang 31 Des 2023 dan 31 Des 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.468.590.745	2.639.185.814	(44,35)
Belanja Barang Non Operasional	30.514.225	60.778.280	-
Belanja Barang Persediaan	3.246.272.273	7.583.067.041	(57,19)
Belanja Jasa	1.400.231.923	1.235.356.994	13,35
Belanja Pemeliharaan	1.493.009.858	2.010.232.112	(25,73)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	92.580.000	156.451.948	100,00
Belanja Barang Badan Layanan Umum	23.218.176.412	15.452.653.921	50,25
Jumlah Belanja Kotor	30.949.375.436	29.137.726.110	6,22
Pengembalian Belanja	-	(7.368.000)	
Jumlah Belanja	30.949.375.436	29.130.358.110	6,24

Belanja barang non operasional sebesar Rp30.514.225 berupa belanja peralatan dan mesin ekstrakomptabel yaitu aset tetap yang nilai perolehannya dibawah nilai kapitalisasi yaitu Rp 1 juta.

Belanja barang BLU sebesar Rp23.218.176.412 terdiri dari belanja barang persediaan bahan baku (525126) sebesar Rp8.572.865.518, belanja pemeliharaan BLU sebesar Rp1.432.225.384, belanja perjalanan (525115) sebesar Rp663.158.813, belanja penyediaan barang dan jasa BLU lainnya (525119) sebesar Rp1.782.365.226, belanja jasa (525113) sebesar Rp806.162.628 dan belanja gaji dan tunjangan (525111) sebesar Rp9.961.398.843. Berikut rincian belanja barang BLU 31 Desember 2023:

Rincian Belanja Barang BLU 31 Desember 2023

No	MAK	Uraian	Realisasi
1	525126	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi-BLU	8.572.865.518
2	524114	Belanja Pemeliharaan BLU	1.432.225.384
3	525115	Belanja Perjalanan	663.158.813
4	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1.782.365.226
5	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	9.961.398.843
6	525113	Belanja Jasa	806.162.628
Total Belanja Barang BLU			23.218.176.412

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp5.120.550.833

B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp5.120.550.833 dan Rp3.026.790.531. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Des 2023 dan 31 Des 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Sarana dan Prasarana	0	0	-
Alat Kesehatan	0	0	-
Belanja Modal BLU	5.120.550.833	3.026.790.531	69,17
Jumlah Belanja Kotor	5.120.550.833	3.026.790.531	69,17
Pengembalian	0	-	-
Jumlah Belanja	5.120.550.833	3.026.790.531	69,17

Belanja modal sebesar Rp5.120.550.833 terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin-BLU (Alkes) sebesar Rp2.117.983.085, Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU (Perangkat Pengolah Data & Informasi) sebesar Rp210.335.000, Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU (Alat Non Medik) sebesar Rp2.318.042.774 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU (Fasilitas Perkantoran) sebesar Rp 474.189.974.

B.6 Surplus / Defisit

Defisit
Rp(17.431.583.464)

Surplus/defisit 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp(17.431.583.464) dan Rp(15.601.505.457). Surplus/defisit merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang terjadi selama periode berjalan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Des 2023 dan 31 Des 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan	24.372.591.649	22.497.761.366	8,33
Beban	41.804.175.113	38.099.266.823	9,72
Surplus/defisit	(17.431.583.464)	(15.601.505.457)	11,73
SILPA/(SIKPA)	(17.431.583.464)	(15.601.505.457)	11,73

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Saldo Anggaran
Lebih Awal
Rp10.176.304.247

C.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.176.304.247 dan Rp6.735.968.096.

Penggunaan SAL
Rp0

C.2 Penggunaan SAL

Jumlah Penggunaan SAL untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penggunaan SAL merupakan penambahan anggaran belanja dan investasi yang berasal dari pendapatan BLU diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

SiLPA/SiKPA
Rp(17.431.583.464)

C.3 Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Jumlah Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(17.431.583.464) dan Rp(15.601.505.457). Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

Penyesuaian
Transaksi BLU
dengan BUN
Rp13.310.727.704

C.4 Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN

Jumlah Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13.310.727.704 dan Rp19.041.841.608. Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN merupakan selisih antara pendapatan alokasi APBN sebesar Rp13.465.447.868 dan Penyetoran PNBPN ke Kas Negara sebesar Rp(154.720.164).

Penyetoran PNBPN ke Kas Negara sebesar Rp154.720.164 berasal antara lain dari pendapatan pemindahtanganan BMN lainnya sebesar Rp151.248.888 pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp3.471.276.

Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya sebesar Rp151.248.888 merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan BMN yang dihentikan penggunaannya dalam operasi pemerintah (dalam kondisi rusak berat) melalui lelang dengan perantara KPNL Surabaya dengan rincian sebagai berikut:

1. Penjualan barang bergerak berupa 1 (satu) paket peralatan dan mesin sesuai dengan Risalah Lelang No. 1504/45/2023 tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp26.234.567. Sudah dilakukan penyetoran ke kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara tanggal 2 Agustus 2023 dengan NTPTN: 9D1B81JNFM164MLN dan NTB: 755672869388.
2. Penjualan kendaraan dinas berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G XW42 sesuai dengan Risalah Lelang No. 1503/45/2023 tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp90.599.999. Sudah dilakukan penyetoran ke kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara tanggal 3 Agustus 2023 dengan NTPTN: 2C10748VV5OCEL86 dan NTB: 755178030746.
3. Penjualan barang bergerak berupa 1 (satu) paket peralatan dan mesin sesuai dengan Risalah Lelang No.1656/45/2023 tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp20.313.312. Sudah dilakukan penyetoran ke kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara tanggal 28 Agustus 2023 dengan NTPTN: EAECC1JNFM1UPKFB dan NTB: 821750795418.
4. Penjualan barang bergerak berupa 1 (satu) paket peralatan dan mesin sesuai dengan Risalah Lelang No. 2484/45/2023 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp4.000.000. Sudah dilakukan penyetoran ke kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara tanggal 22 November 2023 dengan NTPTN: 1A3E761QUR6PR9RB dan NTB: 036062972612.
5. Penjualan barang bergerak berupa 1 (satu) paket peralatan dan mesin sesuai dengan Risalah Lelang No. 2485/45/2023 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp10.101.010. Sudah dilakukan penyetoran ke kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara tanggal 22 November 2023 dengan NTPTN: F8BA361QUR6LHFCI dan NTB: 610846962268.

C.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

*Saldo Anggaran
Lebih Akhir
Rp6.055.448.487*

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp6.055.448.487 dan Rp10.176.304.247. Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan selisih antara Saldo Anggaran Lebih Awal, penggunaan SAL, dan selisih Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) dan Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara
pengeluaran Rp0

Saldo Kas di bendahara pengeluaran per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di bendahara pengeluaran merupakan uang persediaan (UP) dari KPPN.

C.2 Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan Layanan
Umum
Rp6.055.448.487

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp6.055.448.487 dan Rp10.176.304.247. Kas pada Badan Layanan Umum merupakan saldo yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan BLU yang sudah dilakukan pengesahan (SP3B BLU) yang sudah terbit SP2B nya dan saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara BLU yang belum dilakukan pengesahan (SP3B BLU), yang sumbernya berasal dari pendapatan layanan laboratorium berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas dan Bank BLU

Keterangan	31 Des 2023	31 Des 2022
BRI No. Acc 039401003896403	-	3.000.000.000
BRI No. Acc 039401001065301	-	882.534.815
Bank Mandiri No. Acc. 1420075668888	3.626.988.512	3.925.518.929
Bank Mandiri No. Acc. 1420205463580	2.000.000.000	2.000.000.000
Bank Mandiri No. Acc. 1420050738888	408.957.155	360.095.683
Bank Mandiri No. Acc. 1420045898888	29.820	29.820
Uang Tunai	19.473.000	8.125.000
Jumlah	6.055.448.487	10.176.304.247

Terdapat rekening deposito sebesar Rp2.000.000.000 di Bank Mandiri No. Acc. 1420205463580 dan rekening untuk penampungan bunga deposito sebesar Rp408.957.155 di Bank Mandiri No. Acc. 1420050738888.

Terdapat rekening operasional BLU sebesar Rp3.626.988.512 di Bank Mandiri No. Acc. 1420075668888 dan rekening insentif sebesar Rp29.820.

Terdapat pencairan deposito BRI No. Acc 039401003896403 sebesar Rp3.000.000.000 pada 2 Maret 2023 dan bunga deposito BRI No. Acc 039401001065301 sebesar Rp899.194.552 pada 16 Maret 2023.

Sesuai dengan surat nomor S-401/KPN.1602/2023 tgl 4 April 2023 telah

dilakukan penutupan rekening deposito BRI No. Acc 039401003896403 dan rekening bunga deposito BRI No. Acc 039401001065301 oleh KPPN Surabaya Surabaya II.

C.3 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp0

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang bukan pajak sebesar Rp0 merupakan piutang berupa sewa rumah dinas karyawan Balai Besar Laboratorium Surabaya yang dipotongkan pada SPM Gaji bulan berikutnya.

C.4 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Rp47.285.000

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp47.285.000 dan Rp29.205.000 . Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22
Piutang	47.285.000	29.205.000
Jumlah	47.285.000	29.205.000

C.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Rp(236.425)

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(236.425) dan Rp(146.025). Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum			
Lancar	47.285.000	0,50%	236.425
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	47.285.000		236.425

C.6 Persediaan

Persediaan Badan Layanan Umum
Rp1.087.536.672

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.087.536.672 dan Rp1.169.482.846.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	31-Dec-23	31-Dec-22
Barang Konsumsi	219.997.880	249.637.787
Barang untuk Pemeliharaan	33.152.845	101.748.104
Suku Cadang	512.750.701	675.912.367
Bahan Baku	242.072.926	116.859.588
Persediaan lainnya	79.562.320	25.325.000
Jumlah	1.087.536.672	1.169.482.846

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.7 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum
Rp61.775.588.549

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp61.775.588.549 dan Rp55.839.445.045. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	55.839.445.045
Mutasi tambah:	
Pembelian	5.120.550.833
Transfer Masuk	4.725.810.744
Normalisasi	
Penggunaan kembali	-
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	(3.910.218.073)
Normalisasi	
Saldo per 31 Desember 2023	61.775.588.549
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(41.722.147.726)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	20.053.440.823

Mutasi tambah:

- Pembelian peralatan dan mesin senilai Rp5.120.550.833 merupakan anggaran belanja modal BLU. Rincian pembelian peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin

Jenis	RM	BLU
Alat Kesehatan	-	2.117.983.085
Non Alat Kesehatan	-	3.002.567.748
Jumlah	-	5.120.550.833

Peralatan dan mesin non alat kesehatan sebesar Rp3.002.567.748 terdiri dari perangkat pengolah data dan informasi (CAN.537112) sebesar Rp210.335.000, alat non medik (CBV.537112) sebesar Rp2.318.042.774 dan fasilitas perkantoran (EBB.537112) sebesar Rp474.189.974.

- Transfer masuk sebesar Rp4.725.810.744 merupakan transfer masuk yang terdiri dari:
 1. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI sebesar Rp1.835.274.094 berupa barang intrakomptabel sesuai dengan BAST Nomor KN.01.08/D.II/3360/2023 tanggal 13 Juni 2023
 2. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI sebesar Rp2.890.536.650 berupa barang intrakomptabel sesuai dengan BAST Nomor KN.01.08/C.III/13069/2023.

Mutasi kurang:

- Penghentian penggunaan sebesar Rp(3.910.218.073) adalah penghentian penggunaan untuk peralatan dan mesin yang kondisinya rusak berat. Berikut rincian penghentian penggunaan:

Rincian Penghentian Penggunaan

No SK Persetujuan penjualan lelang	Tanggal SK	Kuantiti
S-208/MK.6/KNL.1001/2023	31 Oktober 2022	2
S-215/MK.6/KNL.1001/2023	13 Juli 2023	4
S-192/MK.6/KNL.1001/2023	21 Juni 2023	1
KN.01.08/D.XLVIII/2428/2023	22 Juni 2023	50
KN.01.08/D.XI VIII/6133/2023	6 Sept 23	32

SK Penghentian penggunaan nomor KN.01.08/D.XLVIII/2428/2023 tanggal 22 Juni 2023 sebesar Rp528.376.153 adalah nilai bersih dari SK penghentian penggunaan nomor KN.01.08/D.XLVIII/2428/2023 22 Juni 2023 sebesar Rp868.189.724 dan KN.02.07/XLI/7909/2022 tanggal 11 Oktober 2022 sebesar Rp339.813.571 yaitu nilai perolehan barang yg di hentikan di tahun 2022.

Saldo akhir sebesar Rp3.913.554.573 terdiri dari barang intrakomptabel sebesar Rp3.910.218.073 dan barang ekstrakomptabel sebesar Rp3.336.500.

C.8 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp(41.722.147.726) dan Rp(40.306.362.439).

*Akumulasi Penyusutan
Peralatan dan Mesin
Rp(41.722.147.726)*

C.9 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp12.076.323.948 dan Rp10.251.756.342 . Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Gedung dan Bangunan
Bdan Layanan Umum
Rp12.076.323.948*

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	10.251.756.342
Mutasi tambah:	
Transfer masuk	1.824.567.606
Mutasi kurang:	
Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi	
Saldo per 31 Desember 2023	12.076.323.948
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(4.190.535.486)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	7.885.788.462

Transfer masuk sebesar Rp1.824.567.606 merupakan penerimaan aset tetap dari pengembangan aset renovasi dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian RI sesuai dengan BAST Nomor KN.01.08/D.II/3360/2023 tanggal 13 Juni 2023. Pengembangan aset tetap tersebut yakni kegiatan renovasi dari pengembangan Lab AMR (Antimicrobial resistance).

C.10 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

*Akumulasi Penyusutan
Gedung dan Bangunan
Rp(4.190.535.486)*

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap. Akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp(4.190.535.486) dan Rp(3.905.419.932).

C.11 Jalan, Irigasi dan Jaringan

*Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp563.248.000*

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp563.248.000 dan Rp563.248.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	563.248.000
Mutasi tambah:	
Tambah daya listrik	-
Mutasi kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2023	563.248.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(70.984.914)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	492.263.086

Akumulasi Penyusutan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp(70.984.914)

C.12 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(70.984.914) dan Rp(56.511.033).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	61.775.588.549	(41.722.147.726)	20.053.440.823
2	Gedung dan Bangunan	12.076.323.948	(4.190.535.486)	7.885.788.462
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	563.248.000	(70.984.914)	492.263.086
Akumulasi Penyusutan		74.415.160.497	-45.983.668.126	28.431.492.371

C.13 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Badan
Layanan Umum
Rp2.300.192.500

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp2.300.192.500 dan Rp2.300.192.500 .

Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	2.300.192.500
Jumlah	2.300.192.500

Mutasi:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	2.300.192.500
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	2.300.192.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(2.102.426.875)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	197.765.625

C.14 Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain Badan
Layanan Umum Rp0*

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0 dan Rp684.753.571. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	684.753.571
Mutasi tambah:	
- Penghentian BMN dari Penggunaan	3.910.218.073
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
- penghapusan BMN	(4.594.971.644)
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Mutasi tambah:

- Penghentian penggunaan sebesar Rp(3.910.218.073) adalah penghentian penggunaan untuk peralatan dan mesin yang kondisinya rusak berat. Berikut rincian penghentian penggunaan:

Rincian Penghentian Penggunaan

No SK Persetujuan penjualan lelang	Tanggal SK	Kuantiti
S-208/MK.6/KNL.1001/2023	31 Oktober 2022	2
S-215/MK.6/KNL.1001/2023	13 Juli 2023	4
S-192/MK.6/KNL.1001/2023	21 Juni 2023	1
KN.01.08/D.XLVIII/2428/2023	22 Juni 2023	50
KN.01.08/D.XLVIII/6133/2023	6 Sept 23	32

SK Penghentian penggunaan nomor KN.01.08/D.XLVIII/2428/2023 tanggal 22 Juni 2023 sebesar Rp528.376.153 adalah nilai bersih

dari SK penghentian penggunaan nomor KN.01.08/D.XLVIII/2428/2023 22 Juni 2023 sebesar Rp868.189.724 dan KN.02.07/XLI/7909/2022 tanggal 11 Oktober 2022 sebesar Rp339.813.571 yaitu nilai perolehan barang yg di hentikan di tahun 2022.

Saldo akhir sebesar Rp3.913.554.573 terdiri dari barang intrakomptabel sebesar Rp3.910.218.073 dan barang ekstrakomptabel sebesar Rp3.336.500.

Mutasi kurang:

- Penghapusan BMN sebesar Rp(4.594.971.644) merupakan penghapusan BMN terdiri dari:
 1. Penghapusan BMN dengan pemindahtanganan 2 unit barang intrakomptabel sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KN.02.07/D/0368/2023 tanggal 17 Januari 2023 sebesar Rp 345.800.000.
 2. Penghapusan BMN 86 unit dengan nilai Rp1.027.789.724 terdiri 85 unit peralatan mesin dan 1 unit kendaraan operasional sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/D/9731/2023 tanggal 5 September 2023. Penghapusan BMN sebesar Rp1.027.789.724 terdiri dari barang intrakomptabel sebesar Rp1.023.593.224 dan barang ekstrakomptabel sebesar Rp4.196.500.
 3. Penghapusan BMN 85 unit peralatan mesin dan 1 unit kendaraan operasional sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/D/10935/2023 tanggal 4 Oktober 2023 sebesar Rp2.372.300.000.
 4. Penghapusan BMN 32 unit peralatan dan mesin Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KN.01.08/D/17818/2023 tanggal 18 Desember 2023 sebesar Rp853.278.420

Transaksi pengurangan adalah peralatan dan mesin yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

*Akumulasi Penyusutan Aset
Lainnya Rp0*

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp0 dan Rp(681.595.706).

C.16 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

*Akumulasi Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(2.102.426.875)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(2.102.426.875) dan Rp(1.960.435.000). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud BLU (Software)	2.300.192.500	-2.102.426.875	197.765.625
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	2.300.192.500	-2.102.426.875	197.765.625

C.17 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp0

Uang muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) dari KPPN.

C.18 Utang yang Belum Ditagihkan

*Utang yang Belum
Ditagihkan Rp0*

Utang yang Belum ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0 dan Rp0.

C.19 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak Ketiga
Rp77.969.375*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp77.969.375 dan Rp63.964.581.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak

ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Belanja Barang yang masih harus dibayar sebesar Rp77.969.375 merupakan beban Listrik bulan Desember 2023.

C.20 Ekuitas

Ekuitas

Rp35.741.322.355

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp35.741.322.355 dan Rp34.039.952.835. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp37.701.399.353

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp37.701.399.353 dan Rp41.546.822.974. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Des 2023 dan 31 Des 2022

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Pendapatan alokasi APBN	13.465.447.868	19.621.070.371	(31,37)
Pendapatan Jasa Pelayanan Laboratorium	23.820.736.362	21.563.789.829	10,47
Pendapatan jasa layanan dari entitas lain	118.255.000	94.169.500	25,58
Pendapatan Hibah BLU	-	-	-
Pendapatan BLU Lainnya	296.960.123	267.793.274	10,89
Pendapatan Lain-lain :			
Sewa rumah dinas		-	-
Piutang pelayanan		-	-
Jumlah	37.701.399.353	41.546.822.974	(9,26)

Pendapatan Negara Bukan Pajak merupakan Pendapatan yang diperoleh dari pendapatan alokasi APBN, pendapatan jasa pelayanan laboratorium, pendapatan jasa layanan dari entitas lain dan pendapatan BLU lainnya.

Pendapatan jasa pelayanan laboratorium sebesar Rp23.820.736.362 merupakan penambahan dari pendapatan jasa laboratorium yang telah disahkan Bulan Desember 2023 sebesar Rp23.802.656.362, pendapatan jasa laboratorium yang belum disahkan Bulan Desember 2023 sebesar Rp0, piutang Bulan Desember 2023 sebesar Rp47.285.000 dan dikurangi piutang TAYL sebesar Rp29.205.000.

Pendapatan jasa layanan dari entitas lain sebesar Rp118.255.000 merupakan pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat dalam 1 kementerian/lembaga (transaksi resiprokal).

Pendapatan BLU lainnya sebesar Rp296.960.123 merupakan pendapatan jasa layanan perbankan BLU yang telah disahkan Bulan Desember 2023 sebesar Rp178.845.123, pendapatan jasa perbankan BLU yang belum disahkan Bulan Desember 2023 sebesar Rp0 dan pendapatan lain-lain BLU sebesar Rp118.115.000.

Pendapatan lain-lain BLU sebesar Rp118.115.000 merupakan pendapatan sewa ruangan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya meliputi sewa ruang kuliah, sewa ruang kantin, sewa ruang koperasi dan dan sewa fasilitas untuk

menyimpan sampel.

E.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp15.695.647.687

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15.695.647.687 dan Rp15.619.815.560. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Des 2023 dan 31 Des 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	5.609.047.297	5.835.070.429	(3,87)
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	125.201.547	107.047.753	16,96
Beban Gaji dan Tunjangan BLU	9.961.398.843	9.677.697.378	2,93
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar			
Belanja gaji dan tunjangan BLU yang belum disahkan			
Utang remunerasi			
Jumlah	15.695.647.687	15.619.815.560	0,49

E.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp12.339.252.925

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12.339.252.925 dan Rp10.887.015.744. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	2.643.928.109	469.568.232	463,06
Beban Persediaan Bahan Baku	9.644.449.890	10.407.347.512	(7,33)
Beban Persediaan Lainnya	50.874.926	10.100.000	403,71
Jumlah Beban Persediaan	12.339.252.925	10.887.015.744	13,34

Beban Barang dan
Jasa
Rp5.565.834.122

E.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.565.834.122 dan Rp4.614.240.930. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Des 2023 dan 31 Des 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
521111 Beban Keperluan Perkantoran	366.101.303	1.202.113.709	-69,55
521113 Beban Penambah daya Tahan Tubuh	484.072.110	474.259.345	2,07
521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	299.267.770	429.323.260	-30,29
521115 Beban Honor Operasional Satuan kerja	129.180.000	142.040.000	-9,05
521119 Beban Barang Operasional Lainnya	189.969.562	423.522.850	-55,15
521252 Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	30.514.225	28.704.930	0,00
522111 Beban Langganan Listrik	886.629.496	707.983.785	25,23
522112 Beban Langganan Telepon	6.090.942	6.696.190	-9,04
522113 Beban Langganan Air	31.875.860	15.118.600	110,84
522121 Beban Jasa Pos dan Giro	5.000.000	6.000.000	100,00
522191 Beban Jasa Lainnya	548.605.000	563.523.000	100,00
525113 Beban Jasa	806.162.628	242.571.731	0,00
525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU	1.782.365.226	378.503.530	370,90
521115 Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan kerja	-	-6.120.000	-100,00
Jumlah	5.565.834.122	4.614.240.930	20,62

Beban
Pemeliharaan
Rp4.642.014.860

E.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.642.014.860 dan Rp3.663.302.295. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Des 2023 dan 31 Des 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan	1.432.225.384	193.473.000	640,27
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	850.356.460	567.661.568	49,80
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	642.653.398	1.442.570.544	(55,45)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	202.683.579	191.358.261	5,92
Beban Persediaan suku cadang	1.514.096.039	1.268.238.922	19,39
Pengembalian belanja pemeliharaan peralatan dan mesin			
Jumlah	4.642.014.860	3.663.302.295	26,72

E.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp755.738.813

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp755.738.813 dan Rp693.370.224. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Des 2023 dan 31 Des 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa RM		156.451.948	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota RM			
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota RM	92.580.000		
Beban Perjalanan Biasa BLU	663.158.813	536.918.276	23,51
Jumlah	755.738.813	693.370.224	8,99

E.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp5.471.100.663

Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.471.100.663 dan Rp4.908.510.845. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Des 2023 dan 31 Des 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.971.884.735	4.365.777.275	13,88
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	285.115.554	236.381.663	20,62
Beban Penyusutan Irigasi	5.235.756	5.235.756	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	9.238.125	9.238.125	0,00
Beban Amortisasi Software	141.991.875	282.436.562	-49,73
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintah	57.634.618	9.441.464	510,44
Jumlah	5.471.100.663	4.908.510.845	11,46

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp236.425

E.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp236.425 dan Rp146.025.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Des 2023 dan 31 Des 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TTA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	236.425	146.025	61,91
Jumlah	236.425	146.025	61,91

E.9 Kegiatan Non Operasional

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp(178.755.498)

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Des 2023 dan 31 Des 2022

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	151.248.888	98.801.209	53,08
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-178.755.498	-177.126.063	100,00
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.471.276	480.427.554	(99,28)
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	(154.720.164)	(579.228.763)	(73,29)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(178.755.498)	(177.126.063)	(100,00)

Pendapatan pelepasan aset non lancar adalah pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya sebesar Rp151.248.888 merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan BMN yang dihentikan penggunaannya dalam operasi pemerintah (dalam kondisi rusak berat) melalui lelang dengan perantaraan KPKNL Surabaya dengan rincian sebagai berikut:

1. Penjualan barang bergerak berupa 1 (satu) paket peralatan dan mesin sesuai dengan Risalah Lelang No. 1504/45/2023 tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp26.234.567. Sudah dilakukan penyeteroran ke kas negara sesuai dengan

bukti penerimaan negara tanggal 2 Agustus 2023 dengan NTPTN: 9D1B81JNFM164MLN dan NTB: 755672869388.

2. Penjualan kendaraan dinas berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G XW42 sesuai dengan Risalah Lelang No. 1503/45/2023 tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp90.599.999. Sudah dilakukan penyetoran ke kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara tanggal 3 Agustus 2023 dengan NTPTN: 2C10748VV5OCEL86 dan NTB: 755178030746.
3. Penjualan barang bergerak berupa 1 (satu) paket peralatan dan mesin sesuai dengan Risalah Lelang No.1656/45/2023 tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp20.313.312. Sudah dilakukan penyetoran ke kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara tanggal 28 Agustus 2023 dengan NTPTN: EAEC1JNFM1UPKFB dan NTB: 821750795418.
4. Penjualan barang bergerak berupa 1 (satu) paket peralatan dan mesin sesuai dengan Risalah Lelang No. 2484/45/2023 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp4.000.000. Sudah dilakukan penyetoran ke kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara tanggal 22 November 2023 dengan NTPTN: 1A3E761QUR6PR9RB dan NTB: 036062972612.
5. Penjualan barang bergerak berupa 1 (satu) paket peralatan dan mesin sesuai dengan Risalah Lelang No. 2485/45/2023 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp10.101.010. Sudah dilakukan penyetoran ke kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara tanggal 22 November 2023 dengan NTPTN: F8BA361QUR6LHFCI dan NTB: 610846962268.

Beban pelepasan aset non lancar sebesar Rp178.755.498 merupakan kerugian pelepasan aset.

Pendapatan kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp3.471.276 merupakan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya yang terdiri dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan. Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp3.471.276 merupakan pendapatan dari rumah dinas yang dipotong SPM gaji pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya.

Beban dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp154.720.164 merupakan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya yang terdiri dari pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya sebesar Rp151.248.888 dan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp3.471.276.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

F.1 Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp34.039.952.835*

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp34.039.952.835 dan Rp32.998.878.615.

F.2 Surplus (Defisit) LO

*Surplus/Defisit LO
Rp(6.947.181.640)*

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(6.947.181.640) dan Rp983.295.288. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kegiatan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar
Rp64.110.606*

F.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp64.110.606 dan Rp50.353.932.

*Penyesuaian Nilai
Aset
Rp0*

F.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0*

F.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp0*

F.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0.

*Selisih Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0*

F.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

F.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi lain-lain
Rp64.110.606

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp64.110.606 dan Rp50.353.932. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-lain 31 Des 2023 dan 31 Des 2022

Jenis Koreksi	31-Dec-23	31-Dec-22
Koreksi Piutang	0	0
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan BLU	0	0
Koreksi Penyisihan Piutang	146.025	109.925
Koreksi Kewajiban	63.964.581	50.244.007
Jumlah	64.110.606	50.353.932

Koreksi lain-lain sebesar Rp64.110.606 terdiri dari koreksi penyisihan piutang TAYL sebesar Rp146.025 dan koreksi kewajiban sebesar Rp63.964.581. Koreksi kewajiban sebesar Rp63.964.581 merupakan belanja barang yang masih harus dibayar yaitu berupa beban listrik Bulan Desember 2022.

F.3.6 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas
reklasifikasi Rp0

Koreksi atas reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi atas persediaan atau aset tetap atau aset lainnya. Selisih atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

F.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp8.584.440.554

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp8.584.440.554 dan Rp7.425.000. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas 31 Des 2023 dan 31 Des 2022

Jenis Persediaan	31-Dec-23	31-Dec-22
Ditagihkan ke Entitas Lain	-	0
Diterima dari Entitas Lain	-	0
Transfer kas BLU dari BLU lain	-	0
Transfer Masuk	8.584.440.554	7.425.000
Jumlah	8.584.440.554	7.425.000

Transfer masuk sebesar Rp8.584.440.554 terdiri dari:

a. Berupa persediaan sebesar Rp2.154.948.578 yaitu:

1. Transfer masuk dari Direktorat Pengeloan Imunisasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI berupa bahan penunjang laboratorium (persediaan) sesuai dengan BAST Nomor: KN.02.03/C.IV/4652/2022 tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp56.461.260
2. Transfer masuk dari Direktorat Pengeloan Imunisasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI berupa bahan penunjang laboratorium (persediaan) sesuai dengan BAST Nomor: KN.02.03/C.IV/4654/2022 tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp103.929.300
3. Transfer masuk dari Direktorat Pengeloan Imunisasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI berupa bahan penunjang laboratorium (persediaan) sesuai dengan BAST Nomor: KN.02.03/C.IV/8937/2022 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp87.666.983
4. Transfer masuk dari Direktorat Surveilans dan karantina kesehatan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI berupa bahan penunjang laboratorium (persediaan) sesuai dengan BAST Nomor: KN.02.07/C.IV/292.5/2023 tanggal 6 Januari 2023 sebesar Rp1.577.310
5. Transfer masuk dari Direktorat Surveilans dan karantina kesehatan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI berupa bahan penunjang laboratorium (persediaan) sesuai dengan BAST Nomor: KN.01.08/C.V/24230.14/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebesar Rp20.925.000.
6. Transfer masuk dari Direktorat Pengeloan Imunisasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI berupa bahan penunjang laboratorium (persediaan) sesuai dengan BAST Nomor: KN.02.07/C.IV/4858/2023 tanggal 2 November 2023 sebesar Rp508.021.660
7. Transfer masuk dari Direktorat Pengeloan Imunisasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI berupa bahan penunjang laboratorium (persediaan) sesuai dengan BAST Nomor: KN.02.07/C.IV/5899/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebesar

Rp175.090.086

8. Transfer masuk dari Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI berupa bahan penunjang laboratorium (persediaan) sesuai dengan BAST Nomor: KN.01.07/E.IV/3474/2023 tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp399.328.500.
 9. Transfer masuk dari Direktorat Surveilans dan karantina kesehatan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI berupa bahan penunjang laboratorium (persediaan) sesuai dengan BAST Nomor: KN.01.08/C/24230.14/2023 tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp22.894.000.
 10. Transfer masuk dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI berupa bahan penunjang laboratorium (persediaan) sesuai dengan BAST Nomor: KN.01.08/C.III/13069/2023 tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp500.208.800
 11. Transfer masuk dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI berupa bahan penunjang laboratorium (persediaan) sesuai dengan BAST Nomor: KN.01.06/C.III/5163.5/2023 tanggal 19 Juni 2023 sebesar Rp278.845.679.
- b. Berupa peralatan dan mesin sebesar 4.729.418.244 yaitu:
1. Transfer masuk dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI berupa barang intrakomptabel sesuai dengan BAST Nomor KN.01.08/D.II/3360/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebesar Rp1.838.881.594 yang terdiri dari barang intrakomptabel sebesar Rp1.835.274.094 dan barang ekstrakomptabel sebesar Rp3.607.500
 2. Transfer masuk dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI berupa barang intrakomptabel sesuai dengan BAST Nomor: KN.01.08/C.III/13069/2023 tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp2.890.536.650
- c. Berupa renovasi gedung bangunan sebesar Rp1.824.567.606
1. Transfer masuk dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI berupa pengembangan asset

renovasi sesuai dengan BAST Nomor KN.01.08/D.II/3360/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebesar Rp1.824.567.606. Pengembangan asset tetap tersebut yakni kegiatan renovasi dari pengembangan Lab AMR (Antimicrobial resistance).

Transfer masuk sesuai dengan BAST sebesar Rp8.708.934.428 dan transfer masuk dalam neraca percobaan sebesar Rp8.584.440.554 sehingga terdapat selisih sebesar Rp124.493.874. Selisih tersebut terdiri dari penyusutan aset peralatan dan mesin sebesar Rp120.886.374 dan barang ekstrakomptabel sebesar Rp3.607.500.

F.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

*Kenaikan/
Penurunan Ekuitas
Rp1.701.369.520*

Kenaikan/penurunan ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.701.369.520 dan Rp1.041.074.220. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Kenaikan/Penurunan Entitas terdiri dari:

Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Jenis Persediaan	31-Dec-23	31-Dec-22
Surplus/Defisit LO	-6.947.181.640	983.295.288
Koreksi	64.110.606	50.353.932
Transaksi antar entitas	8.584.440.554	7.425.000
Jumlah	1.701.369.520	1.041.074.220

F.6 Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp35.741.322.355*

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp35.741.322.355 dan Rp34.039.952.835.

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

G.1 Arus Kas dari Kegiatan Operasi

*Arus Kas dari
Kegiatan Operasi
Rp848.446.185*

Jumlah Arus Kas dari Kegiatan Operasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp848.446.185 dan Rp6.368.325.473

G.1.1 Arus Masuk Kas

*Arus Masuk Kas
Rp37.686.790.629*

Jumlah Arus Masuk Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp37.686.790.629 dan Rp42.020.030.528. Arus Masuk Kas diperoleh dari Pendapatan APBN, Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium dan Pendapatan Jasa Layanan Perbankan.

G.1.2 Arus Keluar Kas

*Arus keluar Kas
Rp(36.838.344.444)*

Jumlah Arus Keluar Kas dari kegiatan operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(36.838.344.444) dan Rp(35.651.705.055). Arus Keluar Kas digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai, dan pembayaran Belanja Barang.

G.2 Arus Kas dari Kegiatan Investasi

*Arus Kas dari
Kegiatan Investasi
Rp(4.969.301.945)*

Jumlah Arus Kas dari Kegiatan Investasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(4.969.301.945) dan Rp(2.927.989.322)

G.2.1 Arus Masuk Kas

*Arus Masuk Kas
Rp151.248.888*

Jumlah Arus Masuk Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp151.248.888 dan Rp98.801.209. Arus Masuk Kas diperoleh dari Pelepasan Aset tetap, serta investasi lainnya.

G.2.2 Arus Keluar Kas

*Arus keluar Kas
Rp(5.120.550.833)*

Jumlah Arus Keluar Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(5.120.550.833) dan Rp(3.026.790.531). Arus Keluar Kas digunakan untuk Perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp(5.120.550.833) dan perolehan aset tetap lainnya/aset lainnya sebesar Rp0.

Arus Kas dari
Kegiatan
Pendanaan Rp0

G.3 Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan

Jumlah Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Yang merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan hutang jangka panjang.

Arus Masuk Kas
Rp0

G.3.1 Arus Masuk Kas

Jumlah Arus Masuk Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Arus Keluar Kas
Rp0

G.2.2 Arus Keluar Kas

Jumlah Arus Keluar Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Arus Kas dari
Kegiatan transitoris
Rp0

G.4 Arus Kas dari Kegiatan Transitoris

Jumlah Arus Kas dari Kegiatan Transitoris pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Aktivitas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga seperti potongan pajak.

Arus Masuk Kas
Rp0

G.4.1 Arus Masuk Kas

Jumlah Arus Masuk Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp140.742.624. Arus Masuk Kas diperoleh dari penerimaan PFK. Arus Masuk Kas sebesar Rp0 merupakan output dari aplikasi SAKTI dimana yang sebenarnya adalah tidak ada transaksi transitoris.

Arus keluar Kas
Rp0

G.4.2 Arus Keluar Kas

Jumlah Arus Keluar Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp(140.742.624). Arus Keluar Kas digunakan pengeluaran PFK. Arus Keluar Kas sebesar Rp0 merupakan output dari aplikasi SAKTI dimana yang sebenarnya adalah tidak ada transaksi transitoris.

H. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

H.1 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya adalah:

- a. MANDIRI KCP Surabaya Gubeng A/C 1420075668888 a.n. RPL 135 BBLABKES UNTUK OPS P
- b. MANDIRI KCP Surabaya Gubeng A/C 1420205463580 a.n. RPL 135 BBLABKES UNTUK PKD
- c. MANDIRI KCP Surabaya Gubeng A/C 1420050738888 a.n. RPL 135 BBLABKES UNTUK PKD
- d. MANDIRI KCP Surabaya Gubeng A/C 8100124156021000 a.n. BPG 135 BALAI BESAR LABKES SBY
- e. MANDIRI KCP Surabaya Gubeng A/C 1420045898888 a.n. RPL 135 BBLABKES SBY UTK INSENTIF

Terdapat pencairan deposito BRI No. Acc 039401003896403 sebesar Rp3.000.000.000 pada 2 Maret 2023 dan bunga deposito BRI No. Acc 039401001065301 sebesar Rp899.194.552 pada 16 Maret 2023.

Sesuai dengan surat nomor S-401/KPN.1602/2023 tgl 4 April 2023 telah dilakukan penutupan rekening deposito BRI No. Acc 039401003896403 dan rekening bunga deposito BRI No. Acc 039401001065301 oleh KPPN Surabaya Surabaya II.

H.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya menerima DIPA TA 2023 Nomor : DIPA-024.04.2.415602/2023 tanggal 30 November 2023 dengan total anggaran sebesar Rp36.102.486.000 yang berasal dari sumber dana Rupiah Murni dan PNBPN.

- Revisi 1 tanggal 27 Desember 2022 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya menerima revisi DIPA 1, karena adanya Revisi Blokir mandiri Automatic Adjustmen sesuai surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor PR.04.02/I/3969/2022 tgl 16 Desember 2022 ttg penetapan Automatic Adjustment satker Ditjen Yankes TA 2023 sebesar Rp1.841.773.000 terdiri dari blokir belanja pegawai Rp1.346.593.000 dan belanja tupoksi Rp495.180.000

- Revisi 2 tanggal 22 Januari 2023 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya menerima revisi DIPA 2, karena adanya Buka blokir dari belanja pemeliharaan aplikasi sebesar Rp49.340.000 dan belanja langganan internet sebesar Rp250.000.000.
- Revisi 3 tanggal 25 Januari 2023 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya menerima revisi DIPA 3, karena adanya Pencantuman saldo awal senilai Rp10.176.304.247
- Revisi 4 tanggal 15 Februari 2023 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya menerima revisi DIPA 4, karena adanya Penggunaan saldo awal kas BLU sebesar Rp5.176.304.000, pergeseran antar KRO dalam 1 kegiatan, pergeseran jenis belanja dan penyesuaian RPD hal III DIPA.
- Revisi 5 tanggal 27 Maret 2023 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya menerima revisi DIPA 5, karena adanya Revisi pemutakhiran data POK
- Revisi 6 tanggal 14 April 2023 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya menerima revisi DIPA 6, karena adanya Revisi POK, penyesuaian hal III DIPA, pergeseran RO KRO
- Revisi 7 tanggal 8 Mei 2023 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya menerima revisi DIPA 7, karena adanya Revisi Pagu berubah (efisiensi perjadi)
- Revisi 8 tanggal 24 Mei 2023 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya menerima revisi DIPA 8, karena adanya Revisi penggunaan saldo awal kedua, pemutakhiran data POK, penyesuaian hal III DIPA, pergeseran RO KRO
- Revisi 9 tanggal 7 Juli 2023 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya menerima revisi DIPA 9, karena adanya Revisi penggunaan saldo awal ketiga, penyesuaian hal III DIPA, pergeseran RO KRO
- Revisi 10 tanggal 18 Juli 2023 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya menerima revisi DIPA 10, karena adanya Revisi Pengembalian AA 51 ke BUN
- Revisi 11 tanggal 20 Agustus 2023 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya menerima revisi DIPA 11, karena adanya Revisi Pengembalian AA 52 ke BUN
- Revisi 12 tanggal 18 September 2023 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya menerima revisi DIPA 12, karena adanya Revisi penyesuaian hal III DIPA dan pergeseran RO KRO

- Revisi 13 tanggal 28 November 2023 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya menerima revisi DIPA 14, karena adanya penyesuaian rincian penarikan dana hal III DIPA dan penyesuaian rincian belanja pada RO
- Revisi 1 tanggal 16 Oktober 2023 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya menerima revisi DIPA 13, karena adanya penyesuaian rincian penarikan dana hal III DIPA dan penyesuaian rincian belanja pada RO

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya memperoleh penugasan sebagai Unit Akuntansi Wilayah, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/2007/2022 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah Vertikal (UAPPA/B-W) Kementerian Kesehatan. Sebagai tindaklanjut SK tersebut telah ditunjuk dan ditetapkan pejabat dan staf sebagai Unit Akuntansi Wilayah, dengan keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Nomor HK.02.03/XLI/10/2023.

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya menerima transfer masuk sebesar Rp8.584.440.554 terdiri dari:

a. Berupa persediaan sebesar Rp2.154.948.578 yaitu:

1. Transfer masuk dari Direktorat Pengeloan Imunisasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI berupa bahan penunjang laboratorium (persediaan) sesuai dengan BAST Nomor: KN.02.03/C.IV/4652/2022 tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp56.461.260
2. Transfer masuk dari Direktorat Pengeloan Imunisasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI berupa bahan penunjang laboratorium (persediaan) sesuai dengan BAST Nomor: KN.02.03/C.IV/4654/2022 tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp103.929.300
3. Transfer masuk dari Direktorat Pengeloan Imunisasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI berupa bahan penunjang laboratorium (persediaan) sesuai dengan BAST Nomor: KN.02.03/C.IV/8937/2022 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp87.666.983
4. Transfer masuk dari Direktorat Surveilans dan karantina kesehatan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI berupa

bahan penunjang laboratorium (persediaan) sesuai dengan BAST Nomor: KN.02.07/C.IV/292.5/2023 tanggal 6 Januari 2023 sebesar Rp1.577.310

5. Transfer masuk dari Direktorat Surveilans dan karantina kesehatan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI berupa bahan penunjang laboratorium (persediaan) sesuai dengan BAST Nomor: KN.01.08/C.V/24081.14/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebesar Rp20.925.000.
6. Transfer masuk dari Direktorat Pengelolaan Imunisasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI berupa bahan penunjang laboratorium (persediaan) sesuai dengan BAST Nomor: KN.02.07/C.IV/4858/2023 tanggal 2 November 2023 sebesar Rp508.021.660
7. Transfer masuk dari Direktorat Pengelolaan Imunisasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI berupa bahan penunjang laboratorium (persediaan) sesuai dengan BAST Nomor: KN.02.07/C.IV/5899/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebesar Rp175.090.086
8. Transfer masuk dari Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI berupa bahan penunjang laboratorium (persediaan) sesuai dengan BAST Nomor: KN.01.07/E.IV/3474/2023 tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp399.328.500.
9. Transfer masuk dari Direktorat Surveilans dan karantina kesehatan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI berupa bahan penunjang laboratorium (persediaan) sesuai dengan BAST Nomor: KN.01.08/C/24230.14/2023 tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp22.894.000.
10. Transfer masuk dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI berupa bahan penunjang laboratorium (persediaan) sesuai dengan BAST Nomor: KN.01.08/C.III/13069/2023 tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp500.208.800
11. Transfer masuk dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Kemenkes RI berupa bahan penunjang laboratorium (persediaan) sesuai dengan BAST Nomor: KN.01.06/C.III/5163.5/2023 tanggal 19 Juni 2023 sebesar Rp278.845.679.

- b. Berupa peralatan dan mesin sebesar 4.729.418.244 yaitu:
 - 1. Transfer masuk dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI berupa barang intrakomptabel sesuai dengan BAST Nomor KN.01.08/D.II/3360/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebesar Rp1.838.881.594 yang terdiri dari barang intrakomptabel sebesar Rp1.835.274.094 dan barang ekstrakomptabel sebesar Rp3.607.500
 - 2. Transfer masuk dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI berupa barang intrakomptabel sesuai dengan BAST Nomor: KN.01.08/C.III/13069/2023 tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp2.890.536.650
- c. Berupa renovasi gedung bangunan sebesar Rp1.824.567.606
 - 1. Transfer masuk dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI berupa pengembangan asset renovasi sesuai dengan BAST Nomor KN.01.08/D.II/3360/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebesar Rp1.824.567.606. Pengembangan asset tetap tersebut yakni kegiatan renovasi dari pengembangan Lab AMR (Antimicrobial resistance).

Transfer masuk sesuai dengan BAST sebesar Rp8.708.934.428 dan transfer masuk dalam neraca percobaan sebesar Rp8.584.440.554 sehingga terdapat selisih sebesar Rp124.493.874. Selisih tersebut terdiri dari penyusutan aset peralatan dan mesin sebesar Rp120.886.374 dan barang ekstrakomptabel sebesar Rp3.607.500.